

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan dapat digunakan sebagai modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang. Memang jika melihat karakteristik yayasan, terlihat sulit modus operandi tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui yayasan karena melihat dari pada tahapan pencucian uang. Namun, dari hasil penilaian Tim Evaluator *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APGML) dan Tim *Counter Terrorism Executive Directorate* (CTED) Dewan Keamanan PBB yaitu dengan lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap yayasan sebagai non profit organization di Indonesia akan menjadi celah terjadinya pencucian uang melalui yayasan.
2. Pendayagunaan yayasan sebagai modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang dalam fakta-fakta hukum berdasarkan Putusan Nomor : 152/ Pid. B/ 2011/ PN. KPG dan Putusan Nomor : 1260/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. menyimpulkan bahwa dalam putusan pertama pelaku menggunakan yayasan miliknya sebagai tempat penyimpanan dana hasil tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh pelaku. Penguasaan kepemilikan akun rekening yayasan memudahkan pelaku untuk mengelola segala bentuk transaksi dalam

rekening yayasan. Sedangkan dalam putusan kedua, pelaku melaksanakan modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pembelian asset yang melibatkan yayasan. Modus tersebut dilakukan dengan cara pelaku terlebih dahulu memberikan bantuan dana penyelesaian sengketa terhadap yayasan. Untuk selanjutnya yayasan diikatkan dengan perjanjian pemindahan hak atas tanah. Sehingga, Fakta hukum dalam dua putusan ini membuktikan bahwa modus operandi pencucian uang dapat dilakukan melalui yayasan.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan, Penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Yayasan**

Diperlukan sosialisasi terhadap yayasan untuk lebih berhati-hati dalam menerima dana yang masuk kedalam yayasan. Terkait resiko bahwa dana tersebut merupakan dana hasil kejahatan dan yayasan dipergunakan sebagai sarana pencucian uang. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah terjadinya modus operandi pencucian uang melalui yayasan.

### **2. Bagi Pembuat Undang-Undang**

Dilakukan adanya perbaikan pengaturan dan pengawasan terhadap yayasan. Lebih tepatnya untuk mengkategorikan yayasan sebagai pihak pelapor dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan dikategorikannya yayasan sebagai pihak pelapor maka ada aturan

dimana PPATK berhak untuk mengawasi aliran dana yang masuk ke dalam yayasan serta yayasan memiliki kewajiban pelaporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat dilakukan secara efektif.